

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia di era reformasi saat ini perlu terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan suprastrukturnya. Selain itu, mengingat Indonesia masih merupakan negara berkembang, maka harus terus bersaing dengan negara lain untuk meningkatkan perkembangannya. Menurut Hermanto, 2019 bahwa Pengadaan infrastruktur merupakan hal yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia, karena seperti pada kenyataannya bahwa fasilitas pendukung untuk perkembangan segala bidang kehidupan masyarakat di Indonesia masih tergolong belum memadai.

Desa Leppangeng merupakan salah satu Desa yang menjadi bagian dari daerah yang perlu memaksimalkan peningkatan pembangunan infrastuktur demi kesejahteraan masyarakatnya. Desa Leppangeng terdiri dari 8 dusun yang luas wilayahnya 25.000 Ha, jumlah penduduknya 1.671 orang. Menjadi suatu keharusan bagi pemerintah Desa Leppangeng untuk selalu berusaha menjaga agar bagaimana masyarakat tetap merasa puas dengan pelayanan yang diberikan tidak selalu ambisi pribadi semata.

Masyarakat masih mengeluh mengenai realisasi pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai di desa tersebut yang berkaitan dengan RPJMDes. Pengerjaan proyek masih tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap kepemimpinan kepala desa,

disamping itu RPJMDes tersebut terkadang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan masyarakat sementara peraturan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya masih banyak praktik formalisme pada musyawarah pembangunan di desa yang terjadi karena ketidaktahuan para pelaku terkait dengan agenda pembangunan di desa.

Berdasarkan dengan uraian di atas, penulis menemukan adanya berbagai masalah di Desa Leppangeng dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, salah satu contohnya: yaitu apabila tokoh masyarakat diundang dalam kegiatan rapat Musrenbang, tidak semuanya menghadiri undangan tersebut, dengan alasan faktor kesibukan mereka masing-masing individu, karena ada anggapan masyarakat bahwa perencanaan pembangunan dapat berjalan walaupun tidak dilibatkan masyarakat, masyarakat juga berasumsi bahwa tidak semua yang diusulkan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan dapat terealisasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan penelitian dengan judul **“Analisis Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Faktor-faktor apa yang Mempengaruhi Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa yang Mempengaruhi Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah maka peneliti memberikan batasan penelitian hanya meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di desa leppangeng, penelitian dilakukan di delapan dusun di Desa Leppangeng.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teori ini untuk menguji teori tingkat kepuasan masyarakat (Rendy J. A Sudarto. 2014) dan keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat (KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003). Serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Desa Leppangeng, khususnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa.

3. Manfaat Akademis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan
- b. Sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepuasan Masyarakat

Kepuasan berasal dari bahasa latin “satis”, yang berarti cukup dan sesuatu yang memuaskan akan secara pasti memenuhi harapan, kebutuhan, atau keinginan, dan tidak menimbulkan keluhan (Crow et.all, 2003). Lebih lanjut Oliver (dalam Wati Setiasih, halaman 16 : 2006), mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil yang dirasakan dengan harapannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepuasan merupakan respon sikap individu yang bersifat subyektif terhadap obyek tertentu setelah membandingkannya antara harapan dan kenyataan. (Rendy J. A. Sudarto.2014).

Definisi kepuasan menurut (Zeithmal, V.A., & Bitner, 2006) adalah : “Satisfaction is the customers evalution of product or service in terms of wheter that product or service has meet their needs and expectation”. Dapat diartikan bahwa, kepuasan ialah evaluasi konsumen terhadap produk yang dikonsumsi berkaitan dengan tingkat kepuasan. Menurut (Kotler dan Amstrong, 2009) kepuasan (satisfaction) adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Sedangkan menurut (Tjiptono, 2007) kepuasan adalah merupakan evaluasi konsumen setelah membeli sebuah produk dari berbagai alternatif produk yang ada untuk dikonsumsi.(Irawan A., Komara F.E.2017).

Menurut Supranto (2011: 23), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan senang atau kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan diharapkan. Tjiptono (2012:311) menyatakan bahwa: Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi persepsi atas perbedaan antara harapan awal sebelum pembelian (atau standar kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah memakai atau mengonsumsi produk bersangkutan. Kepuasan merupakan fungsi positif dari harapan pelanggan dan keyakinan diskonfirmasi. Dengan demikian kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat merupakan respon dari perbandingan antara harapan dan kenyataan. Pasolong, (2011: 221) menyatakan bahwa: Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat, di antaranya: hubungan antara pelanggan dengan instansi menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembeli (pemakaian) ulang, terciptanya loyalitas dari pelanggan serta terbentuknya rekomendasi dari mulut ke mulut yang kesemuanya menguntungkan organisasi.

Menurut Molan (2007:177) yang dimaksud dengan kepuasan adalah: “Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan”. Berdasarkan pada pengertian kepuasan pelanggan tersebut, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah mengonsumsi produk atau jasa terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapan yang diinginkannya.

B. Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat

Rahmayanty (2006:96), menyatakan bahwa: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Kepuasan masyarakat dapat menunjukkan tingkat kinerja pembangunan infrastruktur, karena itu diperlukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kinerja pembangunan dengan mengacu pada keputusan Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan pembangunan infrastruktur pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pembangunan infrastruktur secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan pembangunan selanjutnya. Bagi masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pembangunan yang bersangkutan (Rendy J. A. Sudarto.2014). Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Men. PAN Nomor:

63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 8 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pembangunan Infrastruktur
2. Persyaratan Pembangunan Infrastruktur.
3. Kejelasan petugas Pembangunan Infrastruktur.
4. Kedisiplinan petugas Pembangunan Infrastruktur.
5. Tanggung jawab petugas Pembangunan Infrastruktur.
6. Kemampuan petugas Pembangunan Infrastruktur.
7. Kecepatan Pembangunan Infrastruktur.
8. Keadilan mendapatkan Pembangunan Infrastruktur.

C. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Menurut Subri (2006:15), bahwa: Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan ke arah perbaikan yang orientasinya pada modernitas pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan ini merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik Menurut Siagian, (2008:2). definisi pembangunan sebagai berikut: Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan dengan sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam

rangka pembinaan bangsa (nation building). Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. (Kuncoro, 2010:20). Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama.

Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna : “(a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

(Tjokrominot.22) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai “citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut :

- (1) pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- (2) pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- (3) pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai

(value free). (4) pembangunan memperoleh sifat dan konsep transcendental, sebagai meta-disciplinary phenomenon, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, the ideologi of developmentalism. (5) pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai (value loaded) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat. (6) pembangunan menjadi culture specific, situation specific, dan time specific.”

1. Pembangunan Fisik

Menurut B.S Muljana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik atau lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Menurut Kuncoro pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum.

2. Pembangunan Non-fisik

Menurut Wresniwiro pembangunan non-fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non-fisik yaitu berupa peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan kesehatan masyarakat. Bachtiar Effendi menyatakan di dalam pembangunan suatu daerah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang pembangunan fisik, tetapi juga harus bergerak di bidang pembangunan non-fisik atau sosial. Oleh karena itu, adanya

keseimbangan antara pembangunan fisik maupun non-fisik diharapkan dapat berjalan seimbang. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu atau negara akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dalam pengertian yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan financial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial. Dalam bukunya Michael P. Todaro mengutip pendapat Profesor Goulet dan tokoh-tokoh lainnya mengatakan bahwa paling tidak adanya tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar itu adalah kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*). Ketiga hal tersebut nilai pokok atau tujuan inti yang harus dicapai dan diperoleh oleh setiap masyarakat melalui pembangunan. Ketiga komponen tersebut berkaitan secara langsung dengan kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi di seluruh masyarakat dan budaya sepanjang zaman.

Senada dengan konsep diatas, Sutamuhardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan

pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.

b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.

d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).

e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.

f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

D. Pembangunan Infrastruktur

1. Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur merupakan roda penggerak ekonomi, input penting bagi kegiatan produksi dan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan

kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya. Kodoatie (2011 :76), menyatakan bahwa : Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri. Kemudian Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa: Infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi. Mankiw (2003:38) bahwa: “Infrastruktur merupakan wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah, infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan”. Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi.

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, disebutkan dalam Pasal 2, bahwa pembangunan infrastruktur mencakup:

Prasarana dan sarana perhubungan: jalan, jembatan, jalan kereta api, dermaga, pelabuhan laut, pelabuhan udara, penyebrangan sungai dan danau

Prasarana dan sarana perairan : bendungan, jaringan pengairan, bangunan pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan bangunan pembangkit listrik tenaga air;

Prasarana dan sarana permukiman, industri dan perdagangan : bangunan gedung, kawasan industri dan perdagangan, kawasan perumahan skala besar, reklamasi lahan, jaringan dan instalasi air bersih, jaringan dan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan sistem drainase;

Bangunan dan jaringan utilitas umum : gas, listrik dan telekomunikasi. Infrastruktur tidak selesai dibangun secara fisik saja, namun menuntut adanya operasional dengan mengedepankan kualitas pelayanan jasa dan efektifitas pengelolaan infrastruktur (Haris, Abdul. 2005).

2. Macam-macam Infrastruktur

Macam-macam Infrastruktur ada juga macam-macamnya, bisa berupa fungsi dan kegunaanya, menurut (Grigg):

a. Infrastruktur Jalan

- 1) Jalan (Jalan Raya, Jalan Lokal, Jalan Tol, Jalan Arteri)
- 2) Jembatan (Fly over atau Jembatan layang, Underpass atau penghubung jalan bawah, Jembatan penghubung sungai atau jurang)

b. Infrastruktur pelayanan transportasi

- 1) Bandara Udara
- 2) Pelabuhan
- 3) Jalan Rel

c. Infrastruktur air

- 1) Air bersih (pengadaan air bersih digunakan untuk masyarakat)
- 2) Air kotor (Drainase, saluran pembuang akhir, saluran sekunder)
- 3) Sistem air (Bozem, waduk, pendungan air)
- 4) Jalan air (saluran pembuangan akhir, bisa berupa sungai)

d. Infrastruktur manajemen limbah

- 1) Sistem manajemen limbah padat (pengolahan limbah padat, pembuangan hingga pengelolaan)

e. Infrastruktur bangunan dan fasilitas olahraga luar

- 1) Bangunan umum (Rumah sakit, Rumah Ibadah)
- 2) Fasilitas olahraga (Stadion sepak bola, jogging track, lapangan badminton, dsb.)

f. Infrastruktur Produksi dan distribusi energi

- 1) Pembangkit Listrik, pendistribusian listrik, telekomunikasi dan juga bisa berupa Gas

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Kodoatie, R.J. (2005) mengatakan bahwa: infrastruktur adalah fasilitas–fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen–agen publik untuk fungsi–fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan – pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan – tujuan sosial dan ekonomi

E. Mekanisme Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan

Surat Edaran Bersama Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 050/478/Bappeda, tanggal Februari 2009 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2009, Menjelaskan bahwa:

1. Pengertian

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
- c. Narasumber adalah pihak pemberi informasi, yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
- d. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan melalui pembahasan yang disepakati.
- e. Hasil Musrenbang Desa terdiri atas:
 - 1) Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), serta swadaya gotong royong masyarakat.

- 2) Daftar kegiatan strategis yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi.
 - 3) Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada forum Musrenbang Kecamatan.
- f. Hasil MusrenbangKelurahan terdiri dari:
- 1) Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, serta swadaya gotong royong masyarakat Kelurahan.
 - 2) Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi.
 - 3) Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

2. Tujuan

Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2009 diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (musrenbang dusun/kelompok).
- b. Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa/kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pembiayaan lainnya.

- c. Menetapkan kegiatan skala strategi yang akan diajukan untuk dibahas pada forum musrenbang kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi).

3. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk menyelenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah:

a. Dari Desa/Kelurahan:

- 1) Daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah Desa/Kelurahan (dusun atau lingkungan) dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat.
- 2) Daftar permasalahan Desa/Kelurahan, seperti peta kerawanan, kemiskinan dan pengangguran.
- 3) Daftar masalah dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri.
- 4) Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan.
- 5) Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan pada tahun sebelumnya.

b. Dari Kecamatan dan Kabupaten/Kota

- 1) Kode desa/kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan (dua angka/digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan Bappeda mengetahui desa/kelurahan dan kecamatan yang mengusulkan kegiatan prioritas.

- 2) Formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan.
- 3) Hasil evaluasi pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya.
- 4) Informasi dan pemerintah kabupaten/kota tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa/Kelurahan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan diberikan kepada desa/kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya.
- 5) Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksana beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.

4. Mekanisme

Tahapan pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari:

a. Tahap persiapan:

- 1) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah desa lainnya. Tugas tim fasilitator Musrenbang desa adalah memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun/RW/kelompok, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.

- 2) Masyarakat di tingkat Dusun/Rukun Warga (RW) dan kelompok-kelompok masyarakat (misal kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah Keluaran dari musyawarah dusun/RW/kelompok adalah:
 - a) Daftar masalah dan kebutuhan.
 - b) Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RW/kelompok untuk diajukan ke Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - c) Wakil/delegasi dusun/RW/kelompok yang akan hadir dalam kegiatan-kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan (jumlah wakil/delegasi masing-masing dusun/RW/kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat).
- 3) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan.
- 4) Tim penyelenggara Musrenbang Desa/kelurahan melakukan ha-hal sebagai berikut:
 - a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang.
 - c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan.

d) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi.

5) Tahap pelaksanaan:

a) Pendaftaran peserta.

b) Pemaparan camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.

c) Pemaparan camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja Desa/Kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis.

d) Pemaparan Kepala Desa/Lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya, Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan.

e) Penjelasan Kepala Desa tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya.

f) Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain.

g) Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan (masukan: kegiatan prioritas) pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan.

- h) Pemisah kegiatan berdasarkan: (a) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan, dan (b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat daerah yang akan dibahas dan Musrenbang Kecamatan.
- i) Perumusan kriteria untuk menyusun kegiatan prioritas sebagai metode untuk menyelesaikan usulan kegiatan.
- j) Pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat/delegasi Desa/kelurahan (1-5 orang) untuk menghadiri Musrenbang kecamatan. Delegasi ini harus menyertakan perwakilan perempuan.
- k) Penandatanganan Berita Acara MusrenbangDesa/Kelurahan oleh Lurah/Kepala Desa, Camat, Perwakilan masyarakat dan BPD.

6) Keluaran:

Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi:

- a) Prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh Alokasi Dana atau swadaya.
- b) Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan yang akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan.
- c) Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- d) Berita Acara MusrenbangDesa/Kelurahan.

7) Peserta:

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti: Ketua RT/RW; Kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.

8) Narasumber:

Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para anggota badan Perwakilan Desa (BPD), camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan, dan LMS yang bekerja di desa yang bersangkutan. (Ikhsan, 2020).

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpuasan Masyarakat

Menurut Philip Kotler, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-harapannya.

Menurut Zeithaml dan Bitner kepuasan adalah respon atau tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen.

Kepuasan merupakan faktor-faktor dari dalam diri individu, yang menyebabkan mereka bertindak dengan cara tertentu. Jika tidak dikaitkan dengan kepuasan terhadap jasa pelayanan public, maka dapat diasumsikan bahwa kepuasan

adalah respon seseorang terhadap harapan dan kualitas kinerja atau hasil yang dirasakan oleh masyarakat.

Kepuasan masyarakat merupakan tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari masyarakat dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya kesetiaan yang berlanjut, semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan masyarakat semakin tinggi.

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapan. Kepuasan pengguna merupakan alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil yang sama atau melampaui harapan pengguna, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pengguna.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka terdapat kesamaan definisi mengenai kepuasan, yaitu yang menyangkut komponen kepuasan (harapan dan kinerja hasil yang dirasakan). Umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan masyarakat tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang dan jasa).

Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli dan untuk menciptakan kepuasan masyarakat, organisasi publik harus menciptakan dan mengelola sistem untuk memperoleh pelanggan yang lebih banyak dan kemampuan mempertahankan masyarakat.

Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Dari definisi tentang kepuasan tersebut adanya suatu

kesamaan makna bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu penilaian emosiaonal dari pengguna setelah meraskan penggunaan suatu produk dimana harapan dan kebutuhan terpenuhi. Pengguna/masyarakat yang tidak puas mereka akan kecewa, dengan kekecewaan itu masyarakat akan melakukan complain, atau sama sekali tidak melakukan apa-apa.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/25/M.PAN/2/2004, kualitas pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur masyarakat dalam Kep. MENPAN ada 3 (tiga) yaitu:

1. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penataan sistem mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.
3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pembangunan, kepuasan masyarakat dapat diartikan sebagai respon dan hasil penilaian dari masyarakat bahwa konstruksi yang dibangun memberikan tingkat kenikmatan, kenyamanan, keamanan, keindahan dan lain sebagainya. Kepuasan masyarakat dapat dijabarkan ketika konstruksi yang dibangun memiliki dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelayanan publik oleh pemerintahan desa harus bersifat mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik (masyarakat).

Teknik pengukuran kepuasan masyarakat dapat menggunakan pengukuran secara langsung dengan pertanyaan atau pernyataan mengenai seberapa besar dampak dan pengharapan yang dirasakan masyarakat terhadap konstruksi tersebut.

Masyarakat atau responden menilai dan membandingkan kesesuaian antara apa yang diharapkan dan apa yang didapatkan dari sebuah konstruksi. Kepuasan akan tercapai bila terjadi kesamaan antara pengalaman mendapatkan dan merasakan dampak langsung dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat terhadap kualitas pembangunan yang didapatkan. Jadi harapan penghuni terhadap suatu konstruksi semestinya merupakan suatu standar untuk dibandingkan dengan keadaan, kondisi atau kualitas konstruksi yang sesungguhnya.

Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Menurut Harbani Pasolong, Semakin baik pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat (high trust)". Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut.

KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyebutkan bahwa, "Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan". Oleh karena itu, setiap penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam pelayanan publik, pelanggan adalah masyarakat. Dan instansi pemerintah harus bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kepuasan pelanggan dapat diukur menggunakan berbagai metode pengukuran. Kotler secara sederhana mengemukakan empat metode yang dapat mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sebagai berikut:

Sistem Keluhan dan Saran Setiap perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented) perlu memberikan kesempatan seluasluasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan. Media yang bisa digunakan adalah kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus (customer hot lines), dan lainlain.

Survei Kepuasan Pelanggan Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggannya.

Lost Customer Analysis Perusahaan yang menggunakan metode ini untuk menganalisis kepuasan pelanggan dengan cara menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli atau telah beralih pemasok. Hasil dari metode ini akan diperoleh informasi penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini sangat berguna bagi perusahaan untuk mengambil langkah kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

G. Metode Pengolahan dan pengumpulan data

Menurut Sugiyono (2018:213) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam pengumpulan data, metoda yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2018:219) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner yang diberikan kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Teknik kuesioner ini terjadi kontak langsung antara peneliti dengan responden untuk menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, sehingga responden dengan suka rela memberikan data yang objektif. Kuesioner yang diberikan kepada responden merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh sebab itu kuesioner ini harus digunakan untuk mendapatkan data yang valid tentang variabel harga, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan GoRide di wilayah kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur. Dalam penyebaran kuesioner disertakan juga petunjuk pengisian yang jelas sehingga dapat memudahkan responden dalam memberikan jawaban.

Untuk mengukur persepsi responden dalam penelitian ini digunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2018:152) skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Berikut ini adalah penjelasan 5 poin skala likert (Sugiyono, 2018:152):

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Ragu-ragu (R)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Total skor masing-masing individu yang mengisi kuesioner dijumlah dari skor masing-masing item. Kuesioner dianalisis untuk mengetahui batasan antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala total.

Menghitung skala likert $= T \times P_n$

T = Total jumlah responden yang memilih

P_n = Pilihan angka skor Likert.

Interpretasi skor perhitungan dengan cara mengetahui skor tertinggi X dan skor terendah Y dengan rumus sebagai berikut

$Y = \text{Skor tertinggi likert (5)} \times \text{jumlah responden}$

$X = \text{Skor terendah likert (1)} \times \text{jumlah responden}$

Rumus index % = $\frac{\text{Total skor}}{Y \times 100}$ 1

H. Penelitian Terkait Dengan Kepuasan

1. Putri & Agungnanto (2017) mengatakan dalam penelitiannya bahwa tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu aspek dari pembangunan

infrastruktur desa. Dalam hal tersebut, keterlibatan pemerintah desa sangat penting untuk mendorong dan membangkitkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, sehingga masyarakat pun menjadi peduli terhadap pembangunan yang ada dan akan membantu untuk memperlancar proses pembangunan yang dilakukan.

2. Andi Asnudin/2019 “Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan Pelibatan Masyarakat Setempat, Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pelibatan masyarakat dalam Proses Program pembangunan infrastruktur pedesaan (ppip) tahun 2009 dan dampak yang ditimbulkan serta data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk pembelajaran pada kegiatan-kegiatan serupa yang akan mendatang
3. Doni Edwin Siregar/2019, “Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan di Lingkungan Dwi kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Tahun 2019” Metode yang digunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, dengan hasil evaluasi tingkat kepuasan diperoleh hasil 3,03, sehingga tingkat kepuasan terhadap pembangunan jalan dikelurahan dwikora secara umum dikategorikan baik. Sedangkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara” Pada umumnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Air Hitam secara umum masih rendah.

4. Atika Dzulkhijiana/2020 “Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Banyu biru Kabupaten Semarang” Metode yang digunakan Analisis Statistik Deskriptif, dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sebelum dan sesudah program PPIP dinilai bagus yaitu terhadap perkembangan desa dan tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup. Sedangkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang menjadi faktor penghambat tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Air Hitam yaitu rendahnya sumber daya manusia dalam memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam acuan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan.
5. Murba/2017 “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone”. Penelitian ini dilakukan di Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Hasil penelitian yang di temukan adalah implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong masih belum memenuhi harapan masyarakat (kurang optimal), karena beberapa program pembangunan infrastruktur (pembuatan jalan) tidak terlaksana, kemudian program penerangan (listrik) dan jaringan media sosial yang tidak terealisasi, disebabkan karena kurang di perhatikan oleh Pemerintah setempat. faktor penghambat dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong adalah: 1) Keterbatasan

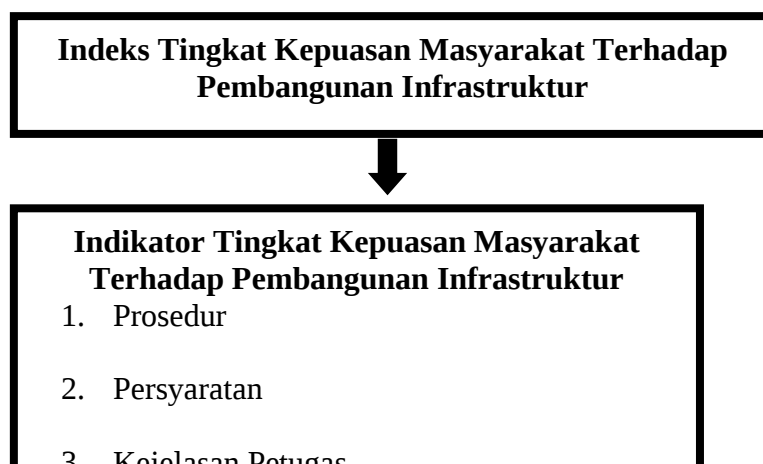
anggaran; 2) tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintah dan masyarakat; 3) Kurang kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur yang sudah di bangun; 4) Serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

I. Kerangka Pikir

Menurut (Ahmad, 2015) kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proporsi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.

Teori (Rendy J. A Sudarto. 2014) dalam Keputusan Men. PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang kemudian dikembangkan menjadi 8 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: Prosedur, Persyaratan, Kejelasan petugas, Kedisiplinan petugas, Tanggung jawab, Kemampuan petugas, Kecepatan, dan Keadilan mendapatkan. selanjutnya didorong oleh beberapa faktor yang memengaruhi yaitu: Sistem Keluhan dan Saran, Survei Kepuasan Pelanggan, Lost Customer Analysis. (KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2003). Berdasarkan beberapa faktor tersebut akan memberikan dampak bagi ketidakpuasan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara sederhana kerangka pikir yang menjadi acuan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pikir

J. Definisi Operasional Variabel

Prosedur merupakan tahapan yang dilakukan oleh pemerintah agar pekerjaan berurutan dengan tujuan agar suatu aktivitas yang dikerjakan dapat berjalan lancar untuk proses pembangunan infrastruktur di Desa Leppangeng.

Persyaratan kerja adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diterima sebagai pegawai atau karyawan terutama pada perekrutan pegawai aparat pemerintah di Desa Leppangeng.

Kejelasan Petugas yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawab), sehingga masyarakat dapat merasakan tingkat kepuasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah khususnya pada sistem pembangunan infrastruktur di Desa Leppangeng.

Kedisiplinan Petugas ialah suatu hal yang sangat penting untuk pertumbuhan organisasi/perusahaan, terutama digunakan untuk motivasi karyawan agar disiplin diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun secara kelompok, demi tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Leppangeng.

Tanggung Jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan, tanggung jawab ini ditujukan khusus pada aparat pemerintah desa agar masyarakat mendapatkan tingkat kepuasan terutama pada pembangunan infrastruktur di Desa Leppangeng.

Kemampuan Petugas ialah tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat merasakan tingkat kepuasan yang diberikan oleh aparat pemerintah khususnya pada pembangunan infrastruktur di Desa Leppangeng.

Kecepatan merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kemampuan ini harus dimiliki oleh aparat pemerintah agar dapat memberikan kepuasan pelayanan dan sejenisnya terutama pada pembangunan infrastruktur di Desa Leppangeng.

Keadilan Mendapatkan ialah hak asasi manusia (HAM) yang wajib dilaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya oleh negara, keadilan inipun wajib diperoleh oleh masyarakat dalam sistem pelayanan,

pembangunan infrastruktur, dll agar masyarakat dapat merasakan tingkat kepuasan dari aparat pemerintah desa khususnya di Desa Leppangeng.

K. Hubungan masyarakat terhadap kepuasan pembangunan infrastruktur

Hubungan masyarakat dan petugas terhadap kepuasan pembangunan infrastruktur sangat erat. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan hubungan tersebut:

Aspek-Aspek Hubungan Masyarakat dan Petugas

1. Partisipasi Masyarakat

- a. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur.
- b. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan mereka.

2. Kualitas Pelayanan Petugas

- a. Petugas pembangunan infrastruktur harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- b. Petugas pembangunan infrastruktur harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

3. Komunikasi yang Efektif

- a. Petugas pembangunan infrastruktur harus berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif.
- b. Petugas pembangunan infrastruktur harus menyampaikan informasi tentang pembangunan infrastruktur kepada masyarakat secara jelas dan akurat.

4. Kepuasan Masyarakat

- a. Kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dapat meningkat jika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- b. Kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur juga dapat meningkat jika petugas pembangunan infrastruktur memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif.

L. Hipotesis

- H0: 1) Ada hubungan antara tingkat kepuasan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur.
- 2) Ada hubungan antara indikator tingkat kepuasan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur.
- H1: 1) Tidak ada hubungan antara tingkat kepuasan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur.
- 2) Tidak ada hubungan antara indikator tingkat kepuasan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016: 4) mengatakan bahwa tipe penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe kuantitatif. Sugiyono (2016: 20) juga mengatakan bahwa jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Karena penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang Analisis Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini direncanakan di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis tertarik mengadakan penelitian di

desa tersebut, dengan alasan bahwa di Desa Leppangeng adalah salah satu Desa percontohan bagi Desa-Desa lainnya karena Desa Leppangeng memiliki berbagai macam Destinasi Wisata, Penghasil Ternak sebagai sumber mata pencarian, Pengelolaan Hasil Tumbuh-tumbuhan sebagai sumber mata pencarian. Waktu penelitian ini selama 5 bulan lamanya di dari bulan November 2022 sampai Maret 2023

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan 2022– 2023				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Studi Literatur					
2	Survei Lapangan					
3	Analisis Data					
4	Asistensi Data ke Pembimbing					
5	Penyusunan Hasil					

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2014) Sampel adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Adapun menurut (Ahmad, 2015) populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Pengertian populasi dalam statistik tidak terbatas pada kelompok/kumpulan orang-orang, namun mengacu pada seluruh ukuran, hitungan, atau kualitas yang menjadi fokus perhatian suatu kajian.

Menurut Amiruddin (2016: 220) populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka peneliti menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 452 Kepala Keluarga.

Tabel 3. 2 Jumlah Kepala Keluarga Desa Leppangeng

No	Jumlah Kepala Keluarga	
1.	Dusun I Bolapetti	93
2.	Dusun II Leppangeng	51
3.	Dusun III Wala-Wala	80
4.	Dusun IV Galung	51
5.	Dusun V Lengke	68
6.	Dusun VI Tosemang	46
7.	Dusun VII Lumpingan	29
8.	Dusun VIII Rante Siwa	34
Total		452 KK

Sumber Data: Data Desa Leppangeng di Aplikasi Siberas Tahun 2022

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2014) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulan akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Ahmad, 2015

juga mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian atau subset (himpunan bagian) dari suatu populasi. Populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan tidak mungkin atau sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampelnya saja. Jadi, sampel merupakan bagian dari populasi, data yang diperoleh tidaklah lengkap.

Teknik penarikan sampel adalah Probability Sampling. Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik Probability Sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini lebih tepatnya peneliti menggunakan teknik Random Sampling atau sampling acak dari populasi keseluruhan Kepala Keluarga di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam pengambilan sampel diambil sebanyak 10% dari jumlah Kepala Keluarga, alasannya karena kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, biaya, serta besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dalam Ahmad (2015: 148) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

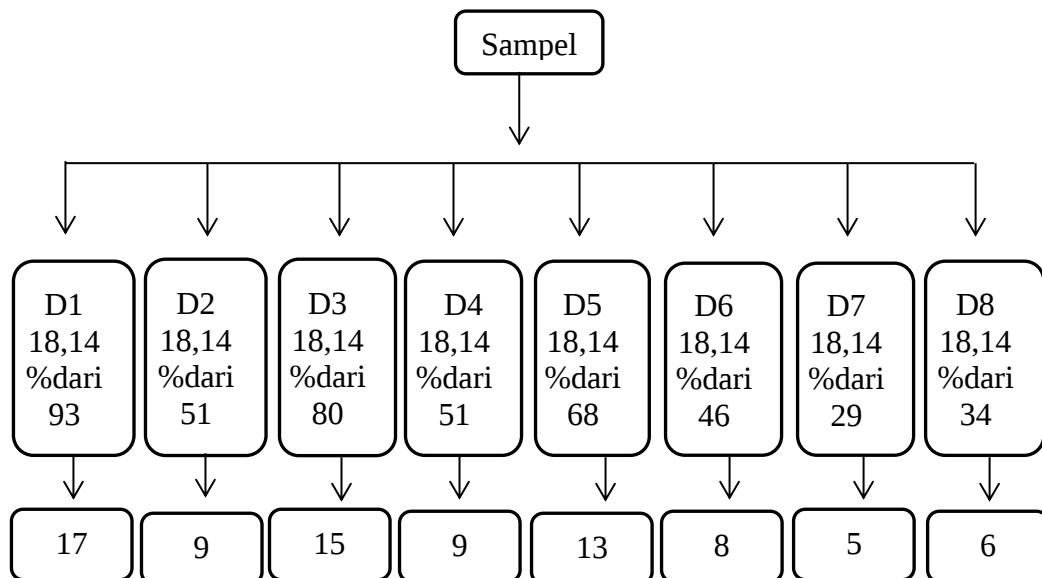
N = Jumlah Penduduk/Kepala Keluarga (populasi)

e = Presesi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%)

$$\begin{aligned}
n &= \frac{N}{1 + N (e)^2} \\
&= \frac{452}{1 + 452 (10\%)^2} \\
&= \frac{452}{1 + 452 (0.1)^2} \\
&= \frac{452}{1 + 452 (0.01)} \\
&= \frac{452}{1 + 4.52} \\
&= \frac{452}{5.52} \\
&= 81,8 \approx \mathbf{82 \text{ Sampel}}
\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, maka sampel yang di dapat dalam penelitian ini adalah 81.8 di bulatkan menjadi 82, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 82 Responden/Kepala Keluarga dan 1 Informan yaitu Kepala Desa Leppangeng, dimana jumlah responden akan terbagi di beberapa Dusun yang ada di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengambilan sampel dengan cara stratified. Digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi kurang proporsional.



Tabel 3. 3 Jumlah Sampel dari 8 dusun di Desa Leppangeng

No	Dusun	Sampel
1.	Dusun I Bolapetti	17
2.	Dusun II Leppangeng	9
3.	Dusun III Wala-Wala	15
4.	Dusun IV Galung	9
5.	Dusun V Lengke	13
6.	Dusun VI Tosemang	8
7.	Dusun VII Lumpingan	5
8.	Dusun VIII Rante Siwa	6

Sumber Data: Kantor Desa Leppangeng

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, adalah suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2016: 226).
2. Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya (Sugiyono, 2016: 226).
3. Kuesioner/Angket, adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan harapan responden memberikan respon/tanggapan atas daftar pertanyaan tersebut (Sugiyono, 2016: 226).
4. Studi kepustakaan, yaitu suatu kegiatan membaca dan mengumpulkan berbagai literatur catatan, buku atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Dokumentasi, adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini adalah melalui dokumen atau peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan sebagainya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti (Sugiyono, 2016: 226).

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014: 199) dalam penelitian kuantitatif, analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden ataupun sumber data lain telah terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji

hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan bantuan table frekuensi untuk memperoleh analisis indeks dari semua variabel.

Data yang diperoleh melalui kuesioner dianalisis dengan melalui skala Likert. Menurut Sugiyono dalam Ahmad (2015: 155) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial yang ditetapkan secara spesifik oleh peneliti sebagai variabel penelitian. Model dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan-pertanyaan.

Beberapa jawaban dari pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian diberi bobot nilai, dengan nilai tinggi lima dan nilai terendah satu. Rata-rata skor dari hasil pertanyaan akan dikelompokkan menjadi lima kategori.

Berdasarkan keterangan di atas maka peneliti menggunakan gradasi yaitu Sangat setuju, Setuju, Cukup setuju, Kurang setuju, Tidak setuju untuk memudahkan menganalisis variabel-variabel. Selanjutnya dibuat berdasarkan nilai median presentase sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Skor Jawaban Kuesioner

No	Preferensi	Bobot
1.	Sangat setuju	5
2.	Setuju	4
3	Cukup setuju	3
4	Kurang setuju	2

5	Tidak setuju	1
---	--------------	---

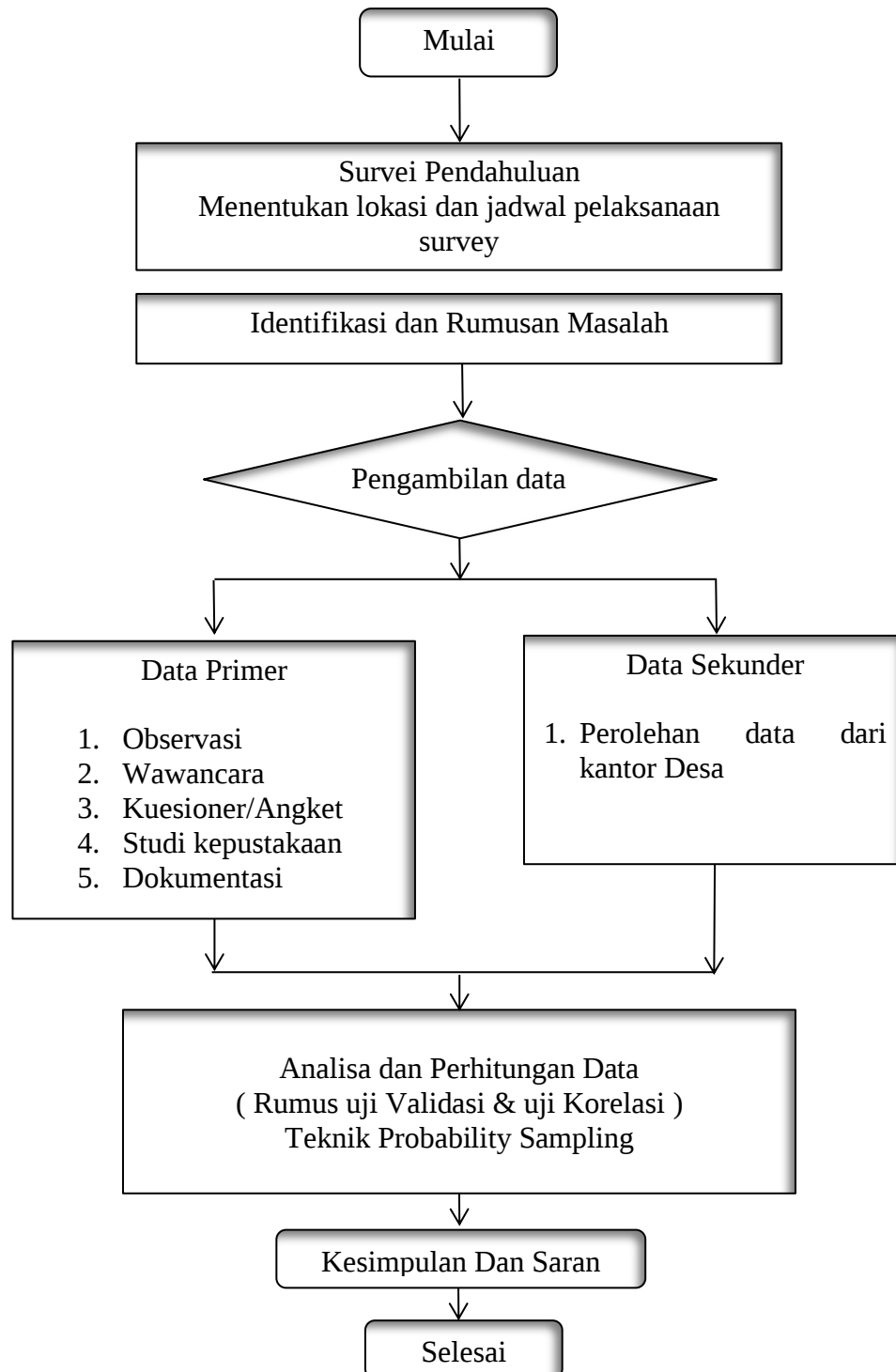
Sumber: Skala Likert dalam Ahmad (2015: 155)

Tabel 3. 5 Skor Jawaban Kuesioner

No	Preferensi	Bobot
1.	Puas	$\geq 50\%$
2.	Tidak Puas	$< 50\%$

Sumber: Skala Likert dalam Ahmad (2015: 155)

F. Alur Penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Leppangeng

1. Sejarah Desa Leppangeng

Leppangeng adalah sebuah desa yang terletak di pegunungan latimojong di Kabupaten Sidenreng Rappang. Demi kesempurnaan dan kelancaran roda pemerintah setelah pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Selatan termasuk daerah tingkat II Sidenreng Rappang maka terbentuk pula Desa Leppangeng yang disebut desa wisata (Pitu Riase) sampai sekarang yang meliputi Dusun Bolapetti dan Dusun Walawala. Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang yang letaknya Berada ditengah tengah kabupaten tepatnya Kabupaten Luwu, Toraja, Enrekang. Desa Leppangeng sebagai desa wisata yang sudah dikenal oleh masyarakat domestik, selain itu terdapat pula salah satu pusat produksi gula aren (Palm Sugar), Benteng kompeni belanda tempat yang bersejarah, Terdapat beberapa Air Terjun, keindahan sangat luas, maka Desa Leppangeng sebagai desa agrowisata menuju Desa wisata lingkungan. Desa Leppangeng merupakan salah satu tempat para pejuang di Sidenreng Rappang pada masa perlawanan melawan penjajahan untuk menyusun taktik dan strategi, sehingga nama leppangeng tetap dipertahankan sampai sekarang ini.

Desa Leppangeng dipimpin oleh seorang Kepala Desa, adapun Kepala Desa Leppangeng yang menjabat saat ini adalah:

- a. Alias S.Pt : Kepala Desa
- b. Sudirman : Sekertaris Desa
- c. Nurdiana : Bendahara

Desa Leppangeng terdiri atas delapan dusun yaitu:

- a. Dusun I Bolapetti
- b. Dusun II Leppangeng
- c. Dusun III Walawala
- d. Dusun IV Galung
- e. Dusun V Lengke
- f. Dusun VI Tosemang
- g. Dusun VII Rantesiwa
- h. Dusun VIII Lumpingan

2. Kondisi Geografis

- a. Batas Desa Leppangeng

Tabel 4. 1 Batas Desa Leppangeng.

No	Batas Wilayah	Desa Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja
2	Sebelah Selatan	Desa Compong	Pitu Riase
3	Sebelah Timur	Desa Bukit Sutra	Larompong
4	Sebelah Barat	Desa Tanatoro	Pitu Riase

Sumber Data: Profil Desa Leppangeng, 2023

b. Luas Wilayah Desa Leppangeng

Tabel 4. 2 Luas Wilayah Desa Leppangeng.

NO	Luas Wilayah	Jumlah (Ha)
1	Luas pemukiman	50,00 Ha
2	Luas persawahan	100,00 Ha
3	Luas perkebunan	1.002,00 Ha
4	Luas pekarangan	50,00 Ha
5	Perkantoran	2,00 Ha
6	Luas prasarana umum lainnya	256,20 Ha
Total lainnya		173,00 Ha

Sumber Data: Profil Desa Leppangeng, 2021

c. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan tofografi Desa Leppangeng terletak pada ketinggian 4.335.244,00 meter dari permukaan laut, dimana kondisi permukaan tanah dataran tinggi/pegunungan, Dataran rendah, lereng dan buki.

d. Iklim

Iklim Desa Leppangeng sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni Kemarau dan Hujan.

e. Keadaan Sosial

Berikut gambaran sarana dan prasarana yang ada di Desa Leppangeng.

1) Sarana Pendidikan

Tabel 4. 3 Sarana Pendidikan.

NO	Pendidikan	Jumlah
1.	TK (Taman Kanak-kanak)	6
2.	SD (Sekolah Dasar)	3
3.	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	3

Sumber Data: Profil Desa Leppangeng, 2023

2) Sarana Keagamaan dan Sosial

Tabel 4. 4 Sarana Keagamaan dan Sosial.

NO	Sarana Keagamaan dan Sosial	Jumlah
1.	Masjid	7
2.	Gedung Masyarakat	1
3.	Rumah Kelompok Tani	2
4.	Rumah Baca Al-Qur'an	8
5.	Rumah Menjahit	3
6.	Rumah Baca	3

Data: *Profil Desa Leppangeng, 2023*

3) Prasarana Transportasi

Tabel 4. 5 Prasarana Transportasi.

NO	Infrastuktur	Rata-Rata Panjang	Jumlah
1.	Jalan	13 KM	1
2.	Jembatan	10 M	10

Sumber Data: *Profil Desa Leppangeng, 2023*

f. Keadaan Ekonomi

1) Tingkat Kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah KK Sejahterah dan Pra Sejahtera di Desa Leppangeng.

Tabel 4. 6 Tingkat Kesejahteraan.

No	Pra Sejahtera	Sejahtera	Jumlah
1.	300	152	452KK

Sumber Data: *Profil Desa Leppangeng, 2023*

2) Mata Pencarian

Desa Leppangeng adalah Desa yang terletak disebelah barat dari Desa Tana Toro Kecamatan Pitu Riase. Berikut perbandingan persentase jenis mata pencarian penduduk.

g. Kondisi Pemerintah Desa Leppangeng

1) Pembagian Wilayah Desa Leppangeng

- 2) Desa Leppangeng terdiri atas 8 Dusun dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak Enam Belas (16).

Berikut nama Dusun dan jumlah RT-nya.

Tabel 4. 7 Pembagian Wilayah.

No	Nama Lingkungan	Jumlah RT
1	Dusun I Bolapetti	2 RT
2	Dusun II Pasangridi	2 RT
3	Dusun III Walawala	2 RT
4	Dusun IV Galung	2 RT
5	Dusun V Lengke	2 RT
6	Dusun VI Tosemang	2 RT
7	Dusun VII Lumpingan	2 RT
8	Dusun VIII Rante Siwa	2 RT

Sumber Data: Aplikasi Siberas, 2020

3) Jumlah Penduduk Desa Leppangeng

Desa Leppangeng terdiri atas 437 KK dengan total jumlah jiwa 1665 orang.

Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki.

Tabel 4. 8 Jumlah Penduduk.

No	Tingkat Penduduk	Jumlah (Jiwa)
1	Jumlah Penduduk Desa Leppangeng	1665
2	Jumlah Menurut Jenis Kelamin	
	a. Laki-laki	902
	b. Perempuan	763
3	Jumlah Menurut Kepala Keluarga	437 KK

Sumber Data: Aplikasi Siberas, 2020

h. Struktur Organisasi

Desa Leppangeng memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekertaris Desa
- 3) Seksi Pemerintah
- 4) Seksi Pembangunan
- 5) Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

i. Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dipeluk di Desa Leppangeng

Tabel 4. 9 Jumlah Penduduk Menurut Agama.

No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	1665
2	Kristen	-
3	Hindu	-
Jumlah		1665

Sumber Data: Profil Desa Leppangeng, 2023

B. Karakteristik Responden

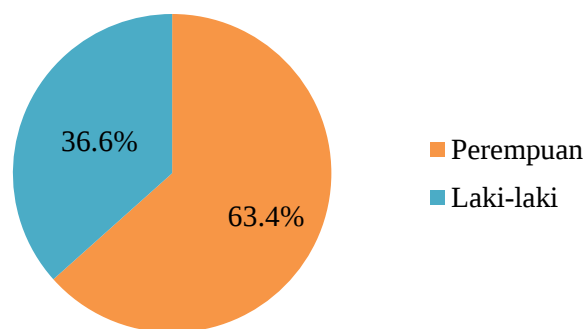
1. Jenis kelamin

Profil jenis kelamin responden masyarakat disajikan pada tabel 4.10, dan gambar 4.10 dibawah ini

Tabel 4. 10 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	52	63,4%
2.	Perempuan	30	36,6%
Jumlah		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data Kuesioner, April 2023



Gambar 4. 1 Diagram Jenis Kelaamin

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa data kuesioner yang menjadi responden penelitian ini lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan yang berjenis kelamin perempuan. Dari total 82 responden 52 (63,4%) diantaranya adalah laki-laki sedangkan yang berjenis kelamin perempuan memiliki persentase sebanyak 30 (36,6%).

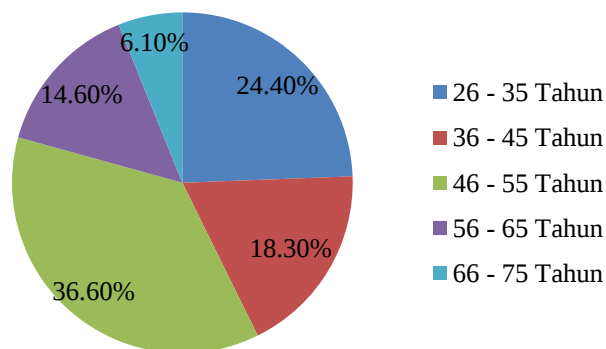
2. Rentang Usia

Mengenai responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 11 Karakteristik Responden Berdasarkan Rentang Usia.

NO	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	26 – 35	20	24,4%
2.	36 – 45	15	18,3%
3.	46 – 55	30	36,6%
4.	56 – 65	12	14,6%
5.	66 – 75	5	6,1%
Jumlah		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data Kuesioner, April 2023



Gambar 4. 2 Diagram Rentang Usia

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui rentang usia yang paling banyak adalah 46-55 tahun yakni 36,6% responden, sedangkan tingkat umur yang paling sedikit adalah 66-75 tahun yakni 6,1%.

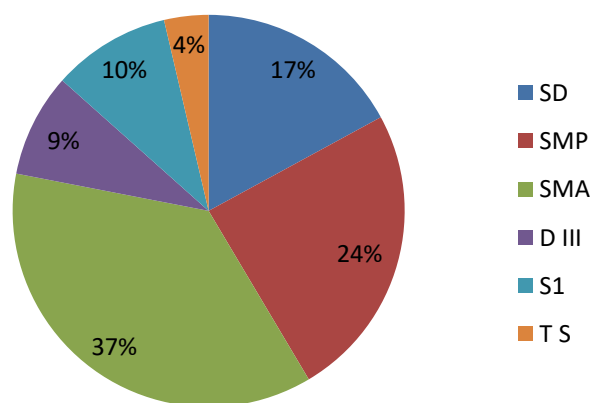
3. Tingkat Pendidikan Terakhir

Berikut merupakan hasil pengolahan statistik deskriptif berdasarkan pendidikan terakhir:

Tabel 4. 12 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.

NO	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD	14	16,25%
2.	SMP	20	25%
3.	SMA	30	37,5%
4.	D III	7	8,75%
5.	S I	8	10%
6.	Tidak sekolah	3	2,5%
Jumlah		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data Kuesioner, April 2023



Gambar 4. 3 Diagram Pendidikan Terakhir

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden berdasarkan Pendidikan yang paling banyak yaitu SMA dengan 30 responden yakni 37,5% dan yang paling sedikit yaitu Tidak sekolah dengan 2 responden yakni 2,5%.

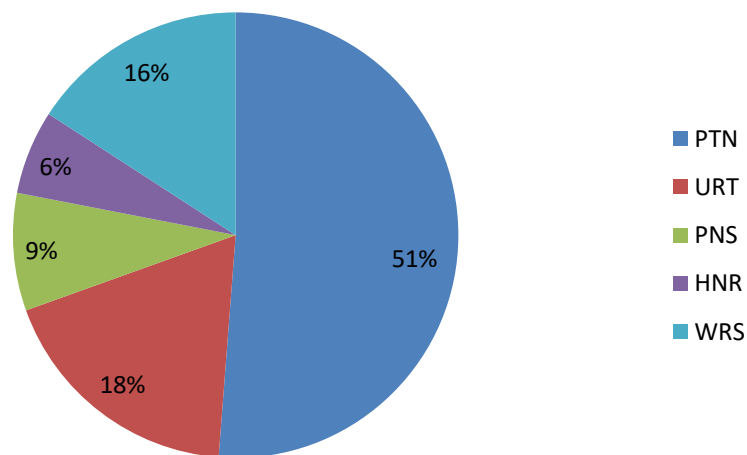
4. Pekerjaan responden

Berikut merupakan hasil pengolahan statistik deskriptif berdasarkan pekerjaan:

Tabel 4. 13 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

NO	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Petani	42	50%
2.	URT	15	18,75%
3.	PNS	7	8,75%
4.	Honorer	5	6,25%
5.	Wiraswasta	13	16,25%
Jumlah		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data Kuesioner, April 2023



Gambar 4. 4 Diagram Pekerjaan

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa data yang diperoleh responden dari kalangan Petani dengan persentase 42 (50%). Kemudian URT persentase sebesar 15 (18%), PNS sebanyak 7 (9%), sementara itu Honorer persentase sebesar 5 (6%) dan 5 (5,3). Sedangkan wiraswasta persentase sebesar 13 (16%).

C. Analisis Kepuasan Pembangunan Infrastruktur

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pada pelaksanaan Pembangunan infrastruktur di Desa Leppangeng, maka perlu diminta tanggapan

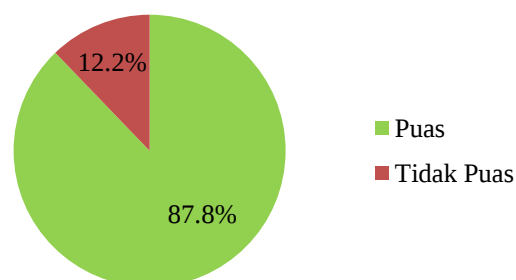
responden mengenai pelaksanaan mekanisme Pembangunan infrastruktur serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Sebagaimana menurut pendapat responden digambarkan dalam beberapa tabel sebagai berikut:

- Prosedur

Tabel 4. 14 Distribusi responden berdasarkan prosedur Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

No	Uraian	Jumlah	Persen %
1	Puas	72	87.8
2	Tidak Puas	10	12.2
TOTAL		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data 2023



Gambar 4. 5 Diagram Prosedur

Berdasarkan data dari diagram di atas mengenai respon masyarakat terkait prosedur Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari jumlah 82 responden sebanyak 72 orang yang kategori puas dengan persentase 87,8%, sedangkan kategori tidak puas sebanyak 10 responden dengan persentase 12,2%, Maka berdasarkan data mengenai respon masyarakat terkait prosedur pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leppangeng Kecamatan Pitu

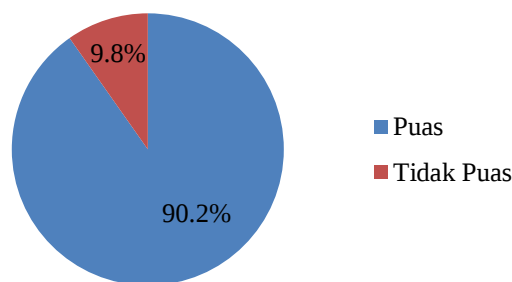
Riase, prosedur tersebut mendapatkan penilaian dari responden yang lebih dominan puas.

- Persyaratan kerja

Tabel 4. 15 Distribusi responden berdasarkan persyaratan Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Uraian	Jumlah	Persen %
1	Puas	74	90.2%
2	Tidak Puas	8	9,8%
TOTAL		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data 2023



Gambar 4. 6 Persyaratan Kerja

Berdasarkan data dari tabel di atas mengenai respon masyarakat terkait persyaratan kerja Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari jumlah 82 responden sebanyak 74 orang yang kategori puas dengan persentase 90,2%, sedangkan kategori tidak puas sebanyak 8 responden dengan persentase 9,8%, Maka berdasarkan data mengenai respon masyarakat terkait persyaratan kerja pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leppangeng

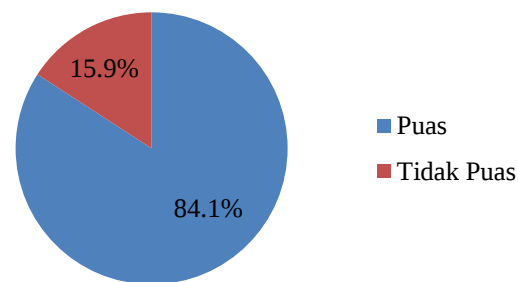
Kecamatan Pitu Riase, persyaratan tersebut mendapatkan penilaian dari responden yang lebih dominan puas.

- Kejelasan Petugas

Tabel 4. 16 Distribusi responden berdasarkan Kejelasan Petugas Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

No	Uraian	Jumlah	%
1	Puas	69	84.1%
2	Tidak Puas	13	15.9%
TOTAL		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data 2023



Gambar 4. 7 Kejelasan Petugas

Berdasarkan data dari tabel di atas mengenai respon masyarakat terkait kejelasan petugas Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari jumlah 82 responden sebanyak 69 orang yang kategori puas dengan persentase 84,1%, sedangkan kategori tidak puas sebanyak 13 responden dengan persentase 15,9%, Maka berdasarkan data mengenai respon masyarakat terkait kejelasan petugas pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leppangeng

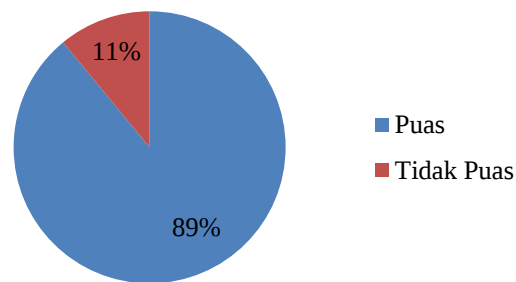
Kecamatan Pitu Riase, kejelasan petugas tersebut mendapatkan penilaian dari responden yang lebih dominan puas.

- Kedisiplinan Petugas

Tabel 4. 17 Distribusi responden berdasarkan Kedisiplinan Petugas Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

No	Uraian	Jumlah	%
1	Puas	73	89%
2	Tidak Puas	9	11%
TOTAL		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data 2023



Gambar 4. 8 Kedisiplinan Petugas

Berdasarkan data dari tabel di atas mengenai respon masyarakat terkait kedisiplinan petugas Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari jumlah 82 responden sebanyak 73 orang yang kategori puas dengan persentase 89%, sedangkan kategori tidak puas sebanyak 9 responden dengan persentase 11%, Maka berdasarkan data mengenai respon masyarakat terkait kedisiplinan petugas pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leppangeng

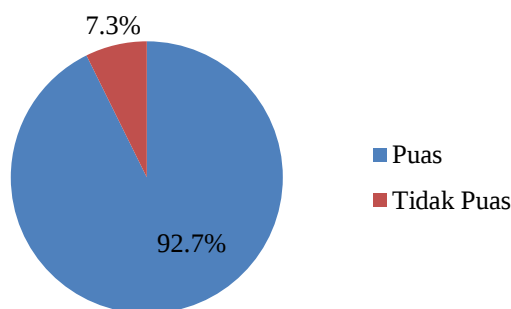
Kecamatan Pitu Riase, kedisiplinan petugas tersebut mendapatkan penilaian dari responden yang lebih dominan puas.

- Tanggung Jawab

Tabel 4. 18 Distribusi responden berdasarkan Tanggung jawab Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Uraian	Jumlah	%
1	Puas	76	92,7%
2	Tidak Puas	6	7,3%
TOTAL		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data 2023



Gambar 4. 9 Tanggung Jawab

Berdasarkan data dari tabel di atas mengenai respon masyarakat terkait tanggung jawab Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari jumlah 82 responden sebanyak 76 orang yang kategori puas dengan persentase 92,7%, sedangkan kategori tidak puas sebanyak 6 responden dengan persentase 7,3%, Maka berdasarkan data mengenai respon masyarakat terkait prosedur pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leppangeng Kecamatan Pitu

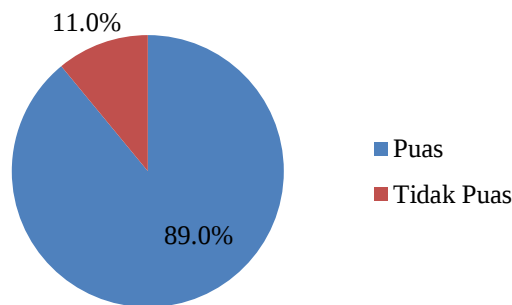
Riase, tanggung jawab tersebut mendapatkan penilaian dari responden yang lebih dominan puas.

- Kemampuan Petugas

Tabel 4. 19 Distribusi responden berdasarkan Kemampuan Petugas Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

No	Uraian	Jumlah	%
1	Puas	73	89%
2	Tidak Puas	9	11%
TOTAL		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data 2023



Gambar 4. 10 Kemampuan Petugas

Berdasarkan data dari tabel di atas mengenai respon masyarakat terkait kemampun petugas Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari jumlah 82 responden sebanyak 73 orang yang kategori puas dengan persentase 89%, sedangkan kategori tidak puas sebanyak 9 responden dengan persentase 11%, Maka berdasarkan data mengenai respon masyarakat terkait kemampuan petugas pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leppangeng

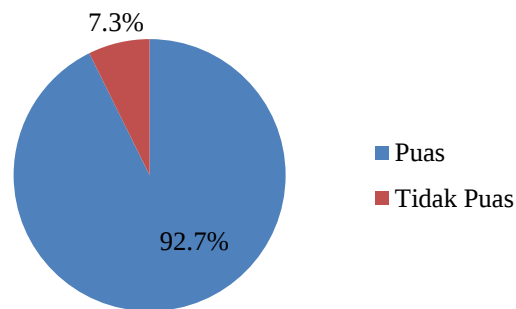
Kecamatan Pitu Riase, kemampuan petugas tersebut mendapatkan penilaian dari responden yang lebih dominan puas.

- Kecepatan

Tabel 4. 20 Distribusi responden berdasarkan Kecepatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

No	Uraian	Jumlah	%
1	Puas	76	92,7%
2	Tidak Puas	6	7,3%
TOTAL		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data 2023



Gambar 4. 11 Kecepatan

Berdasarkan data dari tabel di atas mengenai respon masyarakat terkait kecepatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari jumlah 82 responden sebanyak 76 orang yang kategori puas dengan persentase 92,7%, sedangkan kategori tidak puas sebanyak 6 responden dengan persentase 7,3%, Maka berdasarkan data mengenai respon masyarakat terkait kecepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leppangeng Kecamatan Pitu

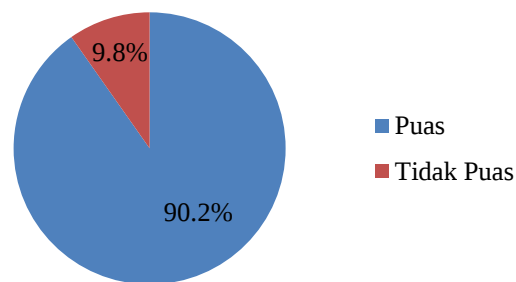
Riase, kecepatan tersebut mendapatkan penilaian dari responden yang lebih dominan puas.

- Keadilan Mendapatkan

Tabel 4. 21 Distribusi responden berdasarkan Keadilan Mendapatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

No	Uraian	Jumlah	%
1	Puas	74	90,2%
2	Tidak Puas	8	9,8%
TOTAL		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data 2023



Gambar 4. 12 Keadilan Mendapatkan Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan data dari tabel di atas mengenai respon masyarakat terkait keadilan mendapatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari jumlah 82 responden sebanyak 74 orang yang kategori puas dengan persentase 90,2%, sedangkan kategori tidak puas sebanyak 8 responden dengan persentase 9,8%, Maka berdasarkan data mengenai respon masyarakat terkait keadilan mendapatkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leppangeng

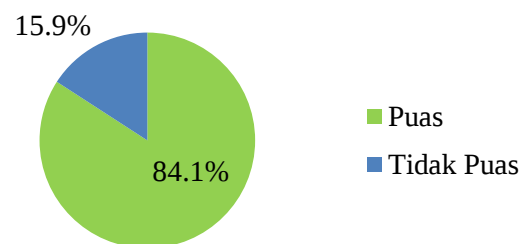
Kecamatan Pitu Riase, keadilan mendapatkan tersebut mendapatkan penilaian dari responden yang lebih dominan puas.

- Rekapitulasi Kepuasan Masyarakat

Tabel 4. 22 Rekapitulasi kepuasan responden tentang Pembangunan Infrastruktur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

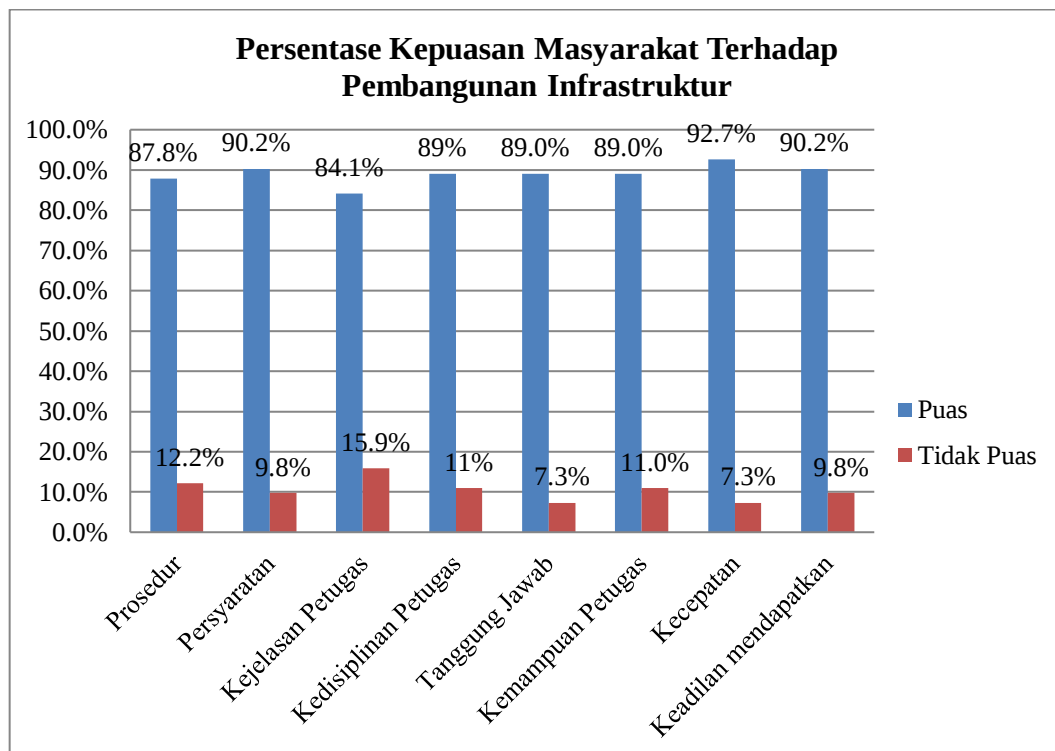
No	Uraian	Jumlah	%
1	Puas	69	84,1%
2	Tidak Puas	13	15,9%
TOTAL		82	100%

Sumber Data: Hasil Olah Data 2023



Gambar 4. 13 Rekapitulasi Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa dari 82 responden di peroleh nilai rata-rata dengan nilai perolehan 33 lebih besar dari nilai median dengan kategori puas sebanyak 69 orang Dengan persentase 84,1% Sedangkan kategori tidak puas sebanyak 13 orang dengan persentase 15,9%.



Gambar 4. 14 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Penelitian ini melibatkan 8 indikator kepuasan pembangunan infrastruktur. Kedelapan indikator tersebut terukur menggunakan skala likert 1-5. yaitu: respon masyarakat terkait prosedur 87,8%, respon masyarakat terkait persyaratan 90,2%, respon masyarakat terkait kejelasan petugas 84,1%, respon masyarakat terkait kedisiplinan petugas 89%, respon masyarakat terkait tanggung jawab 92,7%, respon masyarakat terkait kemampuan petugas 89%, respon masyarakat terkait kecepatan 92,7%, dan respon masyarakat terkait keadilan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Leppangeng berada dalam kategori puas dengan persentase 90,2%.

D. Analisis Data dan Pembahasan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk Analisis Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data hasil jawaban responden dengan membagikan kuesioner terhadap masyarakat di sekitar Pembangunan Infrastruktur Di Desa Leppangeng. Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) computer excel dengan metode analisis validitas, uji korelasi. Berikut hasil Uji penelitian antara lain :

1. Uji Validasi

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (hasil uji validitas) dengan r tabel (nilai tabel) dengan nilai signifikansi 0,05. Hasil uji validitas (nilai r hitung) yang merupakan nilai dari Corrected Item-Total Corelation.

a. Rumus person products moment:

$$r = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

$\sum X$ = Jumlah skor item

$\sum Y$ = Jumlah skor total item

n = Jumlah responden

b. Rumus nilai uji T dengan rumus:

$$t_{hit} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

keterangan:

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden, ($n-2=dk$, derajat kebebasan)

Adapun hasil menggunakan bantuan aplikasi *software* excel diperoleh hasil terhadap masing-masing pernyataan yang digunakan untuk mengukur variable Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur.

Dalam penelitian, uji validasi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tepat. Sebelum menjabarkan rumus uji validasi, penting untuk memahami bahwa setiap sampel yang diambil, seperti sampel X1 dalam kasus ini, harus mewakili populasi secara keseluruhan. Dengan mengambil satu sampel dan menotalkan sampel lainnya, kita dapat fokus pada karakteristik spesifik dari sampel tersebut sambil tetap mempertimbangkan keseluruhan data.

Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menyederhanakan proses analisis tanpa mengurangi keakuratan hasil uji validasi. Selanjutnya, penjabaran rumus akan dilakukan dengan mempertimbangkan sampel X1 sebagai representasi dari populasi yang lebih besar, sambil mengintegrasikan sampel lain dalam bentuk total keseluruhan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

$$\sum_{i=1}^{82} X_i * Y_i = X_1 * Y_1 + X_2 * Y_2 + X_3 * Y_3 + \cdots X_{82} * Y_{82}$$

$$\begin{aligned}
\Sigma XY &= (5*5) + (4*4) + (3*5) + (5*3) + (2*4) + (3*5) + (5*5) + (4*5) + (4*4) + \\
&(5*3) + (4*3) + (2*4) + (4*1) + (5*5) + (4*5) + (5*4) + (5*4) + (5*5) + \\
&(4*5) + (2*4) + (4*5) + (4*4) + (5*5) + (3*5) + (3*5) + (4*4) + (5*4) + \\
&(2*5) + (5*3) + (5*3) + (5*4) + (5*4) + (5*3) + (4*3) + (5*4) + (5*5) + \\
&2*5) + (5*5) + (5*4) + (5*5) + (4*5) + (2*3) + (5*5) + (3*4) + (5*2) + (3*5) \\
&+ (5*5) + (3*4) + (5*4) + (5*4) + (5*3) + (5*5) + (4*3) + (5*5) + (2*4) + \\
&(4*5) + (3*4) + (4*5) + (5*4) + (5*4) + (5*5) + (3*5) + (3*4) + (3*5) + \\
&(4*3) + (5*3) + (4*4) + (5*5) + (3*5) + (3*4) + (5*5) + (3*4) + (2*5) + \\
&(5*4) + (2*5) + (3*4) + (2*4) + (3*5) + (5*3) + (5*3) + (5*1) + (4*5) \\
&= 1332
\end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^{82} X_i = X_1 + X_2 + X_3 + \dots X_{82}$$

$$\begin{aligned}
\Sigma X &= 5 + 4 + 3 + 5 + 2 + 3 + 5 + 4 + 4 + 5 + 4 + 2 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 4 \\
&+ 2 + 4 + 4 + 5 + 3 + 3 + 4 + 5 + 2 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 2 + 5 + \\
&5 + 5 + 4 + 2 + 5 + 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 5 + 2 + 4 + 3 + 4 \\
&+ 5 + 5 + 5 + 3 + 3 + 3 + 4 + 5 + 4 + 5 + 3 + 3 + 5 + 3 + 2 + 5 + 2 + 3 + 2 + \\
&3 + 5 + 5 + 5 + 4 \\
&= 331
\end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^{82} Y_i = Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots Y_{82}$$

$$\begin{aligned}
\Sigma Y &= 5 + 4 + 5 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 4 + 3 + 3 + 4 + 1 + 5 + 5 + 4 + 4 + 5 + 5 + \\
&4 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 5 + 3 + 3 + 4 + 4 + 3 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 4 \\
&+ 5 + 5 + 3 + 5 + 4 + 2 + 5 + 5 + 3 + 4 + 4 + 3 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5 +
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 4 + 4 + 5 + 5 + 4 + 5 + 3 + 3 + 4 + 5 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 + 4 + 5 \\
& + 3 + 3 + 1 + 5 \\
& = 325
\end{aligned}$$

$$\sum_{i=i^2}^{82} X_i^2 = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + \dots + X_{82}^2$$

$$\begin{aligned}
\sum X^2 &= 5^2 + 4^2 + 3^2 + 5^2 + 2^2 + 3^2 + 5^2 + 4^2 + 4^2 + 5^2 + 4^2 + 2^2 \\
&+ 4^2 + 5^2 + 4^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 4^2 + 2^2 + 4^2 + 4^2 + 5^2 + 3^2 \\
&+ 3^2 + 4^2 + 5^2 + 2^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 4^2 + 5^2 + 5^2 \\
&+ 2^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 4^2 + 2^2 + 5^2 + 3^2 + 5^2 + 3^2 + 5^2 + 3^2 \\
&+ 5^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 4^2 + 5^2 + 2^2 + 4^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 5^2 \\
&+ 5^2 + 3^2 + 3^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 4^2 + 5^2 + 3^2 + 3^2 + 5^2 + 3^2 \\
&+ 2^2 + 5^2 + 2^2 + 3^2 + 2^2 + 3^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 4^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum X^2 &= 25 + 16 + 9 + 25 + 4 + 9 + 25 + 16 + 16 + 25 + 16 + 4 + 16 + 25 + 16 + \\
&25 + 25 + 25 + 16 + 4 + 16 + 16 + 25 + 9 + 9 + 16 + 25 + 4 + 25 + 25 + 25 \\
&+ 25 + 25 + 16 + 25 + 25 + 4 + 25 + 25 + 25 + 16 + 4 + 25 + 9 + 25 + 9 + \\
&25 + 9 + 25 + 25 + 25 + 25 + 16 + 25 + 4 + 16 + 9 + 16 + 25 + 25 + 25 + 9 \\
&+ 9 + 9 + 16 + 25 + 16 + 25 + 9 + 9 + 25 + 9 + 4 + 25 + 4 + 9 + 4 + 9 + 25 \\
&+ 25 + 25 + 16 \\
&= 1488
\end{aligned}$$

$$\sum_{i=i^2}^{82} Y_i^2 = Y_1^2 + Y_2^2 + Y_3^2 + \dots + Y_{82}^2$$

$$\begin{aligned}
\sum Y^2 &= 5^2 + 4^2 + 5^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 4^2 + 3^2 + 3^2 + 4^2 \\
&+ 1^2 + 5^2 + 5^2 + 4^2 + 4^2 + 5^2 + 5^2 + 4^2 + 5^2 + 4^2 + 5^2 + 5^2 \\
&+ 5^2 + 4^2 + 4^2 + 5^2 + 3^2 + 3^2 + 4^2 + 4^2 + 3^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + 5^2 + 5^2 + 4^2 + 5^2 + 5^2 + 3^2 + 5^2 + 4^2 + 2^2 + 5^2 + 5^2 + 3^2 \\
& + 4^2 + 4^2 + 3^2 + 5^2 + 3^2 + 5^2 + 4^2 + 5^2 + 4^2 + 5^2 + 4^2 + 4^2 \\
& + 5^2 + 5^2 + 4^2 + 5^2 + 3^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 5^2 + 4^2 + 5^2 + 4^2 \\
& + 5^2 + 4^2 + 5^2 + 4^2 + 4^2 + 5^2 + 3^2 + 3^2 + 1^2 + 5^2 \\
\Sigma Y^2 &= 25 + 16 + 25 + 9 + 16 + 25 + 25 + 25 + 16 + 9 + 9 + 16 + 1 + 25 + 25 + \\
& 16 + 16 + 25 + 25 + 16 + 25 + 16 + 25 + 25 + 25 + 16 + 16 + 25 + 9 + 9 + \\
& 16 + 16 + 9 + 9 + 16 + 25 + 25 + 25 + 16 + 25 + 25 + 9 + 25 + 16 + 4 + 25 \\
& + 25 + 9 + 16 + 16 + 9 + 25 + 9 + 25 + 16 + 25 + 16 + 25 + 16 + 16 + 25 + \\
& 25 + 16 + 25 + 9 + 9 + 16 + 25 + 25 + 16 + 25 + 16 + 25 + 16 + 25 + 16 + \\
& 16 + 25 + 9 + 9 + 1 + 25 \\
&= 1379
\end{aligned}$$

Untuk perhitungan korelasi (r) untuk variabel X_{1i} (pertanyaan variabel X_1 yang pertama adalah sebagai berikut

$$N = 82$$

$$\Sigma XY = 1332$$

$$\Sigma X = 331$$

$$\Sigma Y = 325$$

$$\Sigma X^2 = 1488$$

$$\Sigma Y^2 = 1379$$

$$r = \frac{n (\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{[n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2]}}$$

$$r = \frac{82(1.306) - (331)(317)}{\sqrt{[82(1.488) - 331^2][82(1.313) - 317^2]}}$$

$$r = \frac{107092 - 104927}{\sqrt{[122.016 - 109.561][107.666 - 100.489]}}$$

$$r = \frac{2165}{\sqrt{[12.455][3.509,32]}}$$

$$r = \frac{2165}{9454}$$

$$r = 0.229$$

Rumus T tabel

Tingkat signifikan (taraf nyata) $\alpha = 0,05$

derajat kebebasan (dk) = $n - 1 = 82 - 1 = 81$

Dengan menggunakan tabel distribusi t pada lampiran terlihat bahwa nilai t tabel dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 dan dk = 81 maka di dapatkan nilai t tabel = 1,66

Selanjutnya untuk menghitung nilai t hitung digunakan rumus sebagai berikut.

$$t_{hit} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Sebagai contoh perhitungan untuk mencari t hitung hubungan signifikan X1 (Prosedur pembangunan infrastruktur) dengan tingkat kepuasan masyarakat

$$t_{hit} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Langkah langkahnya sebagai berikut.

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{331}{82}$$

$$\bar{X} = 4,036$$

$$t_{hit} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$$t_{hit} = \frac{4,036 - 3,963}{0,144/\sqrt{82}}$$

$$t_{hit} = \frac{0,073}{0,016}$$

$$t_{hit} = 4,563$$

Dari perhitungan diatas di dapat nilai t tabel 1,66 dan nilai t hitung pada variabel $X_1 = 4,563$. Perbandingan antara t tabel dan t hitung terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($4,563 > 1,66$) artinya hipotesa awal H_0 di terima dalam artian Variabel X_1 signifikan (valid) terhadap variabel Y atau dengan kata lain Prosedur pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

Untuk perhitungan t hitung untuk variabel X_2 sampai X_8 sama dengan perhitungan variabel X_1 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.23

Tab el 4. 23 Uji Validasi

Variabel	T hitung	T tabel	Keterangan
X1 Prosedur	4,563	1,66	Valid
X2 Persyaratan	9,889	1,66	Valid
X3 Kejelasan Tugas	6,123	1,66	Valid
X4 Kedisiplinan petugas	19,388	1,66	Valid

X5 Tanggung jawab	14,022	1,66	Valid
X6 Kemampuan petugas	9,889	1,66	Valid
X7 Kecepatan	15,848	1,66	Valid
X8 Keadilan	12,766	1,66	Valid

Berdasarkan tabel diatas, dari hasil pengolahan data uji validitas diperoleh t hitung $> t$ tabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masing-masing butir pertanyaan dalam kuesioner untuk setiap variable di nyatakan valid.

2. Uji Korelasi

Analisis hubungan (uji korelasi) adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear terhadap variabel. Apabila terdapat hubungan maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya (Y).

Untuk perhitungan korelasi antara variabel X_1 (prosedur) dapat di lihat sebagai berikut :

$$r = \frac{n (\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

$$r = \frac{82(1.306) - (331)(317)}{\sqrt{[82(1.488) - 331^2][82(1.313) - 317^2]}}$$

$$r = \frac{107092 - 104927}{\sqrt{[122.016 - 109.561][107.666 - 100.489]}}$$

$$r = \frac{2165}{\sqrt{[12.455][3.509,32]}}$$

$$r = \frac{2165}{9454}$$

$$r = 0.229$$

dari perhitungan di atas di dapatkan nilai r (korelasi) 0,229. Dapat dilihat bahwa hubungan variabel X_1 dengan Variabel Y (lemah), karena nilai r mendekati 0. Untuk perhitungan korelasi (r) untuk variabel X_2 sampai X_8 sama dengan perhitungannya variabel X_1 dapat di lihat pada tabel 4.24

Tabel 4. 24 Uji Korelasi

VARIABEL	Y	KETERANGAN
X1 Prosedur	$r : 0,229$	Hubungan antara variabel X1 dengan variabel Y lemah
X2 Persyaratan	$r : 0,764$	Hubungan antara variabel X2 dengan variabel Y kuat
X3 Kejelasan Petugas	$r : 0,692$	Hubungan antara variabel X3 dengan variabel Y kuat
X4 Kedisiplinan Petugas	$r : 0,919$	Hubungan antara variabel X4 dengan variabel Y kuat
X5 Tanggung Jawab	$r : 0,135$	Hubungan antara variabel X5 dengan variabel Y Lemah
X6 Kemampuan Petugas	$r : 0,717$	Hubungan antara variabel X6 dengan variabel Y kuat
X7 Kecepatan	$r : 0,140$	Hubungan antara variabel X7 dengan variabel Y Lemah
X8 Keadilan	$r : 0,213$	Hubungan antara variabel X8 dengan variabel Y lemah

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai r (Koefisien Korelasi) sebesar 0,919 rastruktur (X_1) dengan tingkat kepuasan masyarakat erat hubungannya karena

mendekati nilai 1, sedangkan yang paling lemah adalah variabel X5 (tanggung jawab petugas pembangunan infrastruktur) yang nilai korelasinya (r) sebesar 0,135, yang mendekati nilai 0.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari kedelapan variabel X yang diuji terdapat empat variabel X yang memiliki nilai r (korelasi) yang kuat dan empat variabel X yang memiliki nilai r (korelasi) yang lemah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di desa leppangeng berdasarkan variabel X_1 sampai variabel X_8 adalah puas terhadap pembangunan infrastruktur.
2. Berdasarkan asil perhitungan nilai t hitung didapatkan nilai t hitung pada variabel X_1 (Prosedur pembangunan) = 4,563, nilai t hitung variabel X_2 (Persyaratan petugas) = 9,889, nilai t hitung variabel X_3 (Kejelasan Petugas) = 11,473, nilai t hitung variabel X_4 (Kedisiplinan petugas)=19,388, nilai t hitung variabel X_5 (Tanggung jawab) =14,022, nilai t hitung variabel X_6 (Kemampuan petugas) = 9,889, nilai t hitung variabel X_7 (Kecepatan petugas) = 15,848, nilai t hitung variabel X_8 (Keadilan) =12,766 dan nilai t tabel yang di dapatkan = 1,66. Perbandingan antara t tabel dan t hitung dari delapan variabel X terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t tabel artinya hipotesa awal H_0 di terima dalam artian Variabel X signifikan (valid) terhadap variabel Y atau dengan kata lain variabel X_1 sampai variabel X_8 adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Leppangeng.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penelitian dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur dengan melihat adanya indikator-indikator dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi pada perencanaan pembangunan.
2. Hendaknya pemerintah Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang mempertahankan dan meningkatkan pembangunan inrastruktur yang baik agar masyarakat tetap puas terhadap pembangunan inrastruktur di Desa Leppangeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyana, Nielwaty Elly, Hernimawati. 2018. "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.*" Jurnal Niara 11(1): 84.
- Andriani Dewi, Barisan, Kasau R. Nurzin .M, Uceng Andi, Madaling, Mustanir Ahmad. 2019. "*Karakteristik Kepemimpinan Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.*" Jurnal Ilmiah Clean Government 2(2): 157.
- Aprilia, Cahya Ainnur. 2016. "*Membangun Kampung Hijau Bersinar (Upaya Pendampingan dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Kampung Kumuh di Bulak Banteng Lor I Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya).*" Jurnal Pendidikan: 33–35.
- Haryadi Ahmad. 2016. "*Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu.*" Jurnal Administrasi Publik: 169–70.
- Hazreina, G. P. D. 2019. "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*". Jurnal Administrasi Publik: 92-95.
- Laily, E. I. N. 2015. "*Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Kebijakan dan Manajemen Publik*", 3 (3), 299-303.
- Lilya, N. 2020. "*Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Persepektif Ekonomi Islam: Studi pada Pemekaran Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat*". Jurnal Ekonomi Islam. 1-20.
- Matius M. S. 2022. "*Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pendapatan Masyarakat: studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Minas*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 1-7.
- Mustanir, Ahmad. Lubis, Sandi. 2017. *Participatory Rural Appraisal In Deliberations Of Development Planning Proceedings.* Social Science, Education and Humanities Research. 163.316-319.
- Mustanir, A, & Abadi, P. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Rappang.* Jurnal Politik Profetik, 5 (2), 247-261.
- Nirmawati, Mustanir Ahmad, Ali Akhwan, Uceng Andi. 2019. "*Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia di*

Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.” Jurnal Moderat 5(2): 8–9. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2125>.

Nofriko, Hendra. 2016. “*Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013)*.” Jurnal Ilmu Pemerintahan 3: 4.

Shahnaz, Haqqie Yaumil Natasya. 2016. “*Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan (Studi Kasus Kegiatan Pembuatan Pupuk Organic di Desa Blagung , Boyolali)*.” Jurnal Ilmu Pendidikan: 8.

KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003

Sudjana. (2005). *Metode Statistika*. Bandung: PT Tarsito Bandung